

**STRATEGI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan –
Jawa Timur)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Adie Susilo
135020401111042**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
LEMBAR PERSETUJUAN	3
ABSTRAK	4
A. PENDAHULUAN	4
B. TINJAUAN PUSTAKA	7
C. METODE PENELITIAN	9
D. HASIL DAN PEMBAHASAN	11
E. PENUTUP	15
DAFTAR PUSTAKA	18

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel jurnal yang berjudul:

**STRATEGI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar,
Pasuruan – Jawa Timur)**

Yang disusun oleh:

Nama : Adle Susilo
NIM : 195020400111036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang
dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 November 2017

Malang, 3 November 2017

Dosen Pembimbing



Dr. Asti Mandani, SE., ME.
NIP. 196809111961032003

**STRATEGI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan –
Jawa Timur)**

Adie Susilo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: Adiesusilo17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian internal dalam penyaluran dan penagihan kredit usaha rakyat (KUR), mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit, untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kredit bermasalah dan untuk mengetahui prosedur pengawasan kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan oleh bank Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung terhadap bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian di bank BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan bank. Sehingga berpengaruh positif terhadap pemberian KUR dan cara mengatasi kredit bermasalah. Akan tetapi, masih ditemukan pegawai bank yang menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan bank.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Kredit Usaha Rakyat (KUR)

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

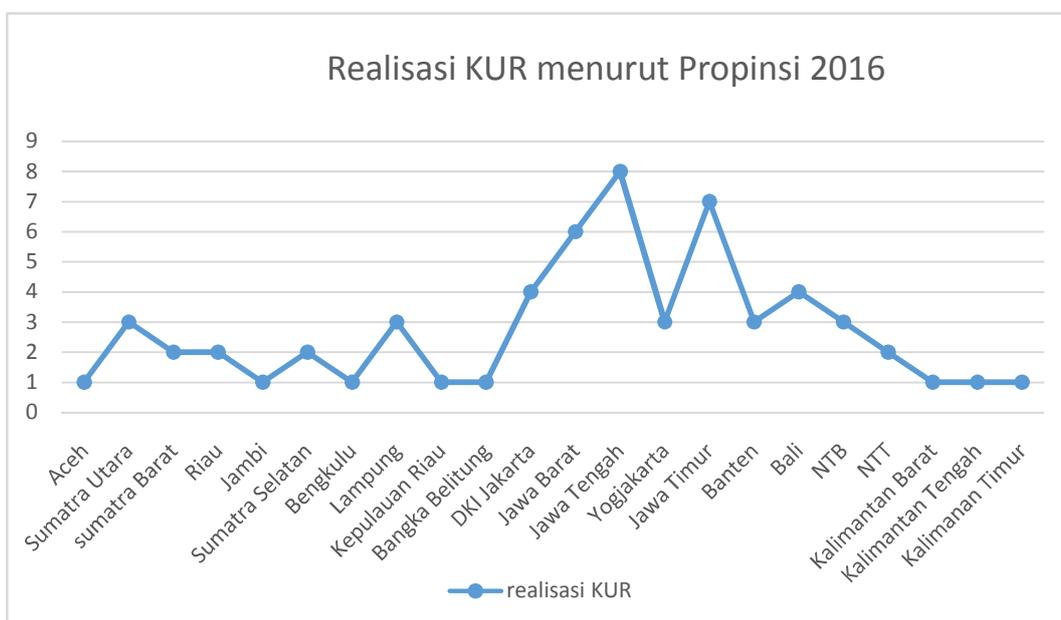
Indonesia adalah negara yang masih berkembang dan melakukan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Pada dasarnya, fundamental ekonomi di Indonesia masih belum kokoh. Di sisi lain, pembangunan ekonomi sangat diperlukan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan disektor usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakat kecil yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk itu, pemerintah mendorong terus memperdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam sektor UMKM ini mampu untuk menyerap tenaga yang banyak sehingga dapat menimalkan tingkat pengangguran di masyarakat sekitar. Dan jika pengangguran di masyarakat menurun maka juga akan menimalisir tingkat kemiskinan di masyarakat.

Disisi lain, permasalahan yang begitu banyak yang di hadapi oleh UMKM sehingga sulit berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar dan

bermodal lebih besar daripada UMKM. Masalah modal menjadi kendala utama untuk memajukan UMKM itu sendiri. dimana untuk meningkatkan permodalan dari UMKM diperlukan lembaga yang menyediakan fasilitas kredit. Karena dengan adanya fasilitas kredit, modal usaha UMKM akan tercukupi dan. mampu mengembangkan usahanya dengan meminjam dana dari lembaga pemberi fasilitas kredit tersebut. Salah satu lembaga penyedia fasilitas kredit yang dipercaya adalah perbankan.

pemerintah merealisasikan upaya peningkatan kontribusi UMKM terhadap perekonomian adalah melalui pembiayaan modal usaha yang dinamakan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit usaha rakyat merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah, khususnya nasabah yang akan menciptakan usaha atau nasabah yang ingin mengembangkan usahanya tanpa menyerahkan anggunan kepada pihak peminjam dengan tingkat suku bunga yang relative kecil yaitu sebesar 9% dari total dana yang dipinjam. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Berikut adalah realisasi KUR di beberapa propinsi di Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan Penyaluran:

Gambar 1: Realisasi KUR 2016



Sumber: kur.ekon.go.id. 2016

Berdasarkan data diatas, realisasi KUR di pulau jawa menunjukkan yang paling tinggi dari pada propinsi-propinsi yang berada di pulau besar seperti Kalimantan dan Sumatra. Jawa timur sebagai salah satu pusat UMKM yang cukup besar sehingga realisasi KUR cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain

di Indonesia. Selain Bank BRI, ada beberapa bank lainnya yang juga turut melaksanakan program dari pemerintah namun tingginya ketertarikan masyarakat untuk mengajukan kredit mikro di Bank BRI adalah karena bank BRI salah satu bank yang unitnya banyak dan memasuki daerah-daerah terpencil. BRI unit Pasar Besar Kota Pasuruan adalah salah satu unit yang letaknya sangat strategis yaitu didekat sentral pasar, sehingga banyak UMKM yang menjadi nasabah bank tersebut dengan lebih mudah mengakses kredit usaha rakyat.

KUR ini tidak berjalan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) banyak kendala untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang adanya KUR Terutama masalah tidak konsistennya debitur untuk membayar angsuran kredit tersebut. Sehingga banyak debitur yang mengalami kredit macet. Berbagai faktor yang menyebabkan debitur mengalami kendala saat mengembalikan kredit perbankan. Sehingga tidak sedikit debitur masuk sebagai daftar NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit macet. NPL (*Non Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Untuk mengetahui mengapa NPL di BRI lebih rendah daripada bank-bank lain, akan dilakukan penelitian dari sisi pengendalian Internal terhadap kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia. Dengan adanya pengendalian internal dalam bidang perkreditan di BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan diharapkan dapat mengurangi NPL. Dan diharapkan dapat juga mencegah penyalagunaan kredit, kecurangan nasabah ataupun penyelewengan dalam pengembalian kredit dan pelunasannya. mengingat bahwa timbulnya kegagalan kredit dapat disebabkan karena kurang maksimalnya atau kurangnya pengawasan terhadap pengendalian internal yang sudah dibuat.. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak sistem pengendalian internal atas pengelolaan kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur?
2. Bagaimana cara mengatasi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur?

B. TINJAUAN PUTSAKA

Pengendalian Internal

Berikut ini adalah definisi dari pengendalian internal menurut beberapa ahli. Menurut Menurut Jusup (2001:252) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan laporan keuangan: Manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditor dan para pemakai lainnya baik secara hukum maupun profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi: Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu serta mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Bagian penting lain dari efektifitas dan efisiensi adalah penggunaan aktiva dan catatan fisik perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak apabila tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama juga berlaku untuk aktiva non fisik seperti piutang usaha, dokumen-dokumen.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku: Dalam akuntansi tidak semua hukum dan undang-undang berhubungan dengan akuntansi, hukum dan peraturan yang tidak berhubungan dengan akuntansi yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan akuntansi yaitu peraturan tentang perpajakan.

Menurut Mulyadi (2002: 183) Sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Menurut Warren, Reeve, & Fees (1999: 183) dalam Munawaroh (2011) pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Menurut Krismiaji (2002:218), penendalian intern adalah rencana dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Marshall dan

Paul (2004:229) menyatakan bahwa, pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan dari pengendalian intern menurut Bastian (2000:154) adalah sebagai berikut :

1. Untuk melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya. Aktiva organisasi bias dicuri, dirusak atau disalahgunakan secara sengaja atau tidak sengaja. Demikian juga untuk aktiva tidak nyata seperti dokumen, surat berharga dan catatan keuangan, pengendalian internal dibentuk untuk mencegah atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.
2. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan operasi. Pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat.
3. Meningkatkan efisiensi usaha bank Pengendalian intern dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha, termasuk pencegahan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
4. Mendorong ditaatinya kebijakn manajemen yang telah ditetapkan Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian intern memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Marshall dan Paul (2004:229) mengatakan bahwa tujuan pengendalian internal adalah untuk: (1) menjaga asset, (2) memberikan informasi yang akurat dan andal, (3) mendorong dan memperbaiki efisiensi, (4) mendorong kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Dari beberapa tujuannya, ada beberapa unsur pokok pengendalian intern. Unsur-unsur pokok tersebut menurut Mulyadi (2001:165) adalah:

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menyusun struktur organisasi yaitu:

- a. Adanya pemisahan fungsi yang jelas (fungsi pencatatan, pelaksanaan, penyimpanan, dan pengolahan).
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan

Dengan adanya wewenang dan prosedur pencatatan yang benar maka dapat melindungi kekayaan, utang, penda[atan, dan biaya perusahaan. Selain itu, dalam penerapannya juga harus didukung dengan menggunakan bagan alir prosedur dan formulir-formulir yang diperlukan.

3. Praktik kerja yang sehat

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

4. Karyawan dengan kualitas yang sesuai dengan tanggung jawab

Unsur karyawan adalah unsur yang paling penting. Kualitas karyawan dapat ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Unit Analisis dan Penentuan Informan

1. Informan kunci: yang menjadi informan kunci adalah Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Pasar Besar Kota Pasuruan.
2. Informan pendukung: dalam memperoleh informasi terkait data penelitian terdapat informan pendukung yaitu Account Officer/mantra dan Teller PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Pasar Besar Kota Pasuruan.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dengan menggunakan wawancara, penulis dapat mendapatkan data langsung dari narasumber sehingga data yang diperoleh lebih valid. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan oide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Esterberg 2002).

2. Observasi

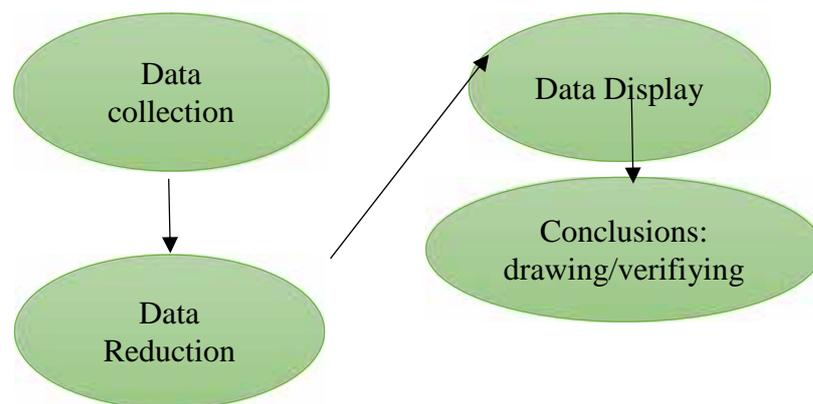
Tujuan dilakukannya obervasi untuk dapat mengamati secara langsung dan mencatat fenomena yang muncul dalam setting lokasi, objek, atau yang akan diteliti sehingga tidak ada manipulasi data. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Nasution dalam Sugiyono 2013).

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode Analisis Data

Gambar 2: Komponen dalam analisis data (interactive model)



Sumber: Sugiyono (2013)

Uji Validitas Data

Menurut Sugiyono (2013) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Untuk menguji validitas data dari penelitian kualitatif akan dilakukan dengan cara menguji *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*. Berikut dapat diuraikan masing-masing cara uji validitas data:

1. Uji Credibility (kepercayaan)

Pada penelitian ini uji kredibilitas data yang diperoleh menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan untuk memastikan data yang dihasilkan dianggap benar. Uji triangulasi dibagi menjadi beberapa cara sebagai berikut:

- a) **Triangulasi sumber** untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b) **Triangulasi teknik** untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pengendalian Kredit Usaha Rakyat

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank sangat membantu permodalan UMKM di daerah sekitar bank tersebut. Kredit yang ditawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimana suku bunga lebih rendah dari kredit pada umumnya yaitu sebesar 9%. Pada pinjaman ini hanya khusus diberikan pada UMKM untuk modal usaha dan bukan diperuntukan untuk pengusaha besar atau kredit konsumtif. Untuk menjaga aset dan aktivitas kredit yang diberikan bank agar berjalan baik dan sesuai dengan kebijakan yang di berikan oleh bank diperlukan suatu pengendalian internal yang mampu menjamin jalannya kredit tersebut. Untuk menjawab bagaimana proses pemberian kredit di bank BRI mengenai prosedur saat pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diuraikan dalam analisis dari data yang sudah didapat dari penelitian sebagai berikut:

1. Pengajuan Kredit

Pada saat pelaksanaan pengajuan kredit usaha rakyat masih banyak kendala yang dihadapi oleh bank. Misalnya dalam pengajuan KUR perlu dilengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah namun, sebagian besar kendala dari calon nasabah tersebut adalah masalah ijin usaha calon nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank melalui *customer service* dan mantri membantu memberikan surat untuk mendapatkan ijin usaha dari pejabat desa atau kelurahan setempat. Akan tetapi dalam proses pengajuan kredit ini benar-benar melakukan dengan obyektif dan tidak secara subyektif yang artinya melihat calon nasabah apakah dikenal maupun tidak dikenal oleh pegawai bank tersebut. Saat sesudah melengkapi syarat-syarat pengajuan kredit, dilakukan survey ke calon nasabah untuk meyakinkan adanya usaha nasabah. Apabila dalam pengajuan kredit tersebut dilakukan oleh nasabah lama dan nasabah lama tersebut akan meminjam kredit usaha rakyat kembali maka tidak perlu melakukan melengkapi syarat-syarat awal kembali, hanya melakukan survey ulang ke nasabah lama tersebut.

2. Analisis KUR di BRI

Pelaksanaan KUR di BRI dilakukan dengan cara 5c yaitu *character, capacity, capital, condition of economic dan collateral*. Pada pelaksanaan 5c tersebut, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai bank, terutama pada karakter nasabah. Tidak sedikit karakter nasabah yang bisa dikatakan kurang baik yang di alami oleh bank sehingga dapat merugikan pihak bank dan menyebabkan gagal bayar. Misalnya pada saat wawancara ekspresi dan jawaban calon nasabah meyakinkan tentang memiliki usaha akan tetapi pada saat survei ke tempat calon nasabah berbohong akan adanya usahanya tersebut ternyata calon nasabah tidak memiliki usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, bank melalui mantri selaku yang bertugas untuk mensurvei calon nasabah melakukan mendatangi tempat usahanya tersebut dan menanyakan kepada tetangga sekitar apakah calon nasabah tersebut benar-benar memiliki usaha. Disisi pegawai ditemukan penyimpangan atas proses analisis KUR tersebut misalnya pada saat akan melakukan survey mantri meminta ijin ke kepala unit untuk melakukan survei akan tetapi, mantri melakukan penyimpangan yaitu melakukan kegiatan yang berlawanan dengan kegiatan yang seharusnya diwajibkan saat bertugas mensurvei calon nasabah. Misalnya dengan melakukan tidur-tiduran di masjid pada saat ijin survei. Hal ini bisa menyebabkan

pengendalian kurang baik yang dilakukan oleh salah satu petugas mantri dan bisa menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari.

3. Analisis Agunan KUR di BRI

Dalam analisis agunan KUR semestinya tidak ada yang namanya agunan, akan tetapi di BRI tetap dilaksanakan agunan untuk bertujuan mengurangi risiko kredit macet yang akan merugikan bank. Pada saat proses analisis agunan, BRI unit Pasar Besar sudah melaksanakan sesuai kebijakan yang dibuat oleh BRI pusat yaitu mengecek keadaan fisik agunan apakah layak menjadi jaminan ataupun tidak. Dalam hal ini apabila nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya maka jaminan yang diberikan oleh nasabah tersebut akan dilelang oleh pihak perbankan untuk menutupi kerugian yang dialami bank akibat gagal bayar.

4. Analisis Penetapan KUR di BRI

Penetapan KUR sudah dijalankan sesuai kebijakan yang dibuat oleh pihak bank. Pada hal ini, kepala unit selaku yang berwenang memutuskan berapa nominal pinjaman yang diberikan kepada calon nasabah menugaskan mantri untuk melakukan survei usaha yang dijalani oleh calon nasabah tersebut. Dalam melakukan penetapan jumlah kredit mantri tidak melihat secara subyektif calon nasabah melainkan secara obyektif menurut hasil survei mantri sebelumnya. Penetapan jumlah kredit ini mantri melihat seberapa besar usaha nasabah, omset dan jumlah agunan yang diberikan oleh nasabah.

5. Persetujuan KUR di BRI

Pelaksanaan persetujuan KUR yang berwenang adalah kepala unit bank. Disini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh BRI pusat dalam pelaksanaan persetujuan kredit. Dalam prosesnya mantri sesudah melakukan survei dan menetapkan jumlah kredit yang harus diberikan ke calon nasabah akan memberikan usulan berapa yang harus diberikan kepada calon nasabah kemudian kepala unit tetap mutlak yang mempersetujui apakah calon nasabah tersebut. dalam teorinya yang berwenang pelaksanaan persetujuan kredit adalah petinggi bank atau kepala bank, dan sesuai teori di BRI Unit Pasar Besar yang berwenang dalam persetujuan kredit adalah kepala unit.

6. Pencairan Kredit

Proses pencairan kredit usaha rakyat di BRI sudah berjalan sesuai peraturan. Sebelum proses pencairan kredit ini, pihak bank membuat perjanjian dengan calon nasabah sebelum pencairan kredit. Sesuai dengan teori perjanjian tersebut bertujuan untuk calon nasabah agar melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari bank. Apabila perjanjian telah dibuat dan disepakati bersama maka pencairan kredit dapat dilaksanakan melalui teller. Disini teller menjalankan amanat sesuai dari kepala unit untuk mengecek syarat apa yang diperlukan dalam melakukan proses pencairan kredit. Apabila ditemukan kekurangan dalam syarat pencairan kredit maka pencairan kredit tidak bisa dilakukan. Pencairan kredit nasabahnya harus datang suami istri apabila sudah suami istri tanda tangan di kantor untuk mendatangi perjanjian hutang yang di materai, yang mengelola semua itu *customer service* setelah selesai semua dibayar oleh teller dan semua dilakukan di kantor.

7. Monitoring atau pengawasan

Menurut teori yang melakukan pengawasan kepada nasabah adalah kepala unit dan mantri. Akan tetapi di BRI Unit Pasar Besar yang bertugas mengawasi nasabah hanya mantri. Mantri melakukan pengawasan melalui via telepon dalam waktu satu kali dalam tiga hari. Dalam pengawasan mengunjungi nasabah mantri melakukan kunjungan minimal seminggu satu kali untuk memastikan keadaan usaha calon nasabah. Disini mantri dalam melakukan pengawasan juga memberikan solusi atau masukan kepada nasabah supaya usaha yang dijalankan mengalami kemajuan. Tidak hanya melalui via telepon dan kunjungan nasabah, pengawasan nasabah juga dilakukan oleh mantri melalui keadaan rekening nasabah apakah dalam keadaan bagus ataupun sebaliknya.

8. Sebab-sebab kredit bermasalah

Sebelum melakukan tindakan penyelesaian kredit bermasalah, mantri mencari tau apa saja penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut. petugas mantri sudah mendatangi nasabah yang terdeteksi telah mengalami kredit bermasalah. pada saat mendatangi nasabah tersebut mantri menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam usahanya. sebagian besar kendala yang dihadapi oleh nasabah adalah penurunan omset. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh mantri adalah pembinaan kepada nasabah untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Pada

saat melakukan pembinaan, mantri memberikan solusi dan nasihat kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya.

9. Penyelesaian kredit bermasalah

Seperti bank-bank pada umumnya, apabila kredit bermasalah itu sudah terjadi maka pihak bank melakukan tindakan Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antra lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian *rescheduling* tersendiri. Yang kedua persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dalam *reconditioning* ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir penataan kembali (*restructuring*) perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank , konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat di serta dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

E. PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam jurnal ini membahas tentang pengendalian internal supaya tidak terjadi kredit macet pada kebijakan baru pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia, dilihat dari segala tindakan yang telah dilakukan disini terlihat bahwa pengendalian internal itu perlu untuk menjaga kesehatan bank. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Unit Pasar Besar Kota Pasuruan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan survey ke nasabah, masih ada pegawai mantri yang melakukan penyimpangan kerja dalam melakukan survey yaitu ketika melakukan survey melainkan melakukan kegiatan lain di luar survey sehingga melupakan tugas survey ke calon nasabah tersebut
2. Pengendalian internal pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan masih memiliki beberapa kekurangan, kekurangan tersebut diantaranya:
 - a. Struktur organisasi pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan masih terdapat kekurangan yaitu adanya perangkapan fungsi mantri yang bertugas melakukan survey, analisis dan penagihan.
 - b. Pada pengajuan kredit belum adanya lembar *checklist* yang dapat mempermudah nasabah untuk memenuhi kelengkapan berkas-berkas pengajuan kredit.
 - c. Pada Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) masih berbentuk buku yang didalamnya terdapat banyak debitur dan tidak dapat disimpan di dalam berkas nasabah yang bersangkutan.
 - d. Masih ada perangkapan fungsi pada mantri yang tugasnya dari *survey* lapangan, analisis kredit, dan penagihan dilakukan oleh satu orang.
3. Pada saat penolakan kredit belum adanya surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan kredit tidak dapat diproses.
4. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan masih memiliki beberapa kekurangan, kekurangan tersebut pada saat pengawasan kredit Ka. Unit belum ikut terjun langsung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah yang bersangkutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas maka akan memberikan saran perbaikan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelemahankelemahan tersebut dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dapat meningkatkan pengendalian intern. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan tugas survey ke calon nasabah, petugas mantri harus melakukan tugasnya sesuai kebijakan bank dan tidak melakukan kegiatan lain diluar kegiatan survey ke calon nasabah.

2. Sebaiknya mantri hanya bertugas mensurvey, dan melakukan penagihan kredit.
3. Sebaiknya bagian CS dapat melakukan analisis kredit agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi-fungsi yang terkait.
4. Sebaiknya pada saat kredit tidak dapat diproses maka sebaiknya membuat surat penolakan kredit dan mencantumkan alasan kredit tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.
5. Kepala unit sebaiknya ikut berperan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Ka. Unit juga melakukan pengecekan ulang secara acak terhadap calon nasabah yang sudah di survey oleh mantri sebelum putusan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, 2011. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penjualan Jasa Perawatan Air Conditioner dan Piutang pada CV. Mavista Technic*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aditya, Cindy. 2016. *Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada Pt. Bpr Shinta Daya Sleman, Yogyakarta*. Jurnal akuntansi Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro.
- Anggawirya, Erhans, 2000. *Sistem Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Ercontara Rajawali.
- Azalia Meidiana. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada Perusahaan Distributor (Studi Kasus Pada Pt. Javas Tripta Gemala)*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Bastian. 2000. *Sistem Akuntansi Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*, Jakarta: Salemba Empat,
- Boynton, Johnson, Kell. 2003. *Modern Auditing, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Esterberg, Kristin G. 2002 *Qualitative Methods in social Research*, Me Graw Hill.
- Faiz, Ihda. 2015. *Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus Pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri*. Universitas Gadjah Mada, Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 6 Nomor 1 Halaman 1-174 Malang, April 2015 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879.
- Handayani, Annisa 2010. *Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Hasibuhan. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Heykal, Evi. 2014. *Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk*. Accounting and Finance Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University Jln. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480. Binus Business Review Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 194-209.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta Pusat. Gramedia.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta. Gramedia.
- Jusup, Al, Haryono. 2001. *Auditing*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Unit dan Percetakan AMP YPKN.

- Machpudin. 2008. *Peranan Sistem Akuntansi Penggajian Dalam Mengefektifan Sistem Pengendalian Intern Gaji Dan Upah Pada Pt. X Bandung*. Bandung: Universitas Sangga Buana YPKP. Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 2, No. 2, Desember 2008, 119-131.
- Mahmoeddin. 2002. Kredit Bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marshall, Paul. 2004. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2014. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Martanti, Retno dan Masyuroh. 2015. *Peran Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Dalam Meminimalisasi Non Performing Loan Pada Pt Bank Mitra Niaga, Tbk*. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 1 No. 2 Tahun 2015.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh. 2011. *Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri)*. STKIP PGRI Jombang. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.13, No. 1, Maret 2011: 76-82
- Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta : Salemba Empat.
- , 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Prismawanti, Pramuris. 2014. *Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Studi Pada Pt. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta*. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pujianik, Rindah. 2011. *Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip/Pp No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Trunojoyo Madura. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 7, Nomor 2, September 2011, 102-116.
- Rapina, Leo. 2011. *Peranan Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Pada Siklus Persediaan dan Pergudangan (Studi Kasus Pada PT.Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Bandung)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Univ.Kristen Maranatha. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 06 Tahun ke-2 September-Desember 2011.
- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2006. Accounting Information System. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabi, Nisa M. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Itern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesi Cabang Limboto*. Jurnal Akuntansi Jurusan Akuntansi Universitas Gorontalo.
- Safriana, Fifi. 2014. *Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Di Pt. Taspen (Persero) Tanjungpinang)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Saraswati, I Ketut Yadnyana. 2014. *Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Denpasar*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Sari, Dewi Nilam. 2016. *Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit Macet Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Artha Karya*. Jurnal Akuntansi Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Administratif. Bandung: CV Alfabeta.
- , 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Alfabeta.

Zulviano. 2014. *Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada Pt Sarana Sulsel Ventura*. Jurnal Stie Nobel Indonesia.